

Belanja Modal- 2 Jalan di Sinjai Barat Tak Pernah Tersentuh Aspal Sejak Kemerdekaan, Warga: Pemerintah Pilih Kasih



Potret ruas jalan di Desa Turungan Baji, Sinjai Barat. Jalan ini belum pernah diaspal sejak Indonesia merdeka.

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/03/27/2-jalan-di-sinjai-barat-tak-pernah-tersentuh-aspal-sejak-kemerdekaan-warga-pemerintah-pilih-kasih>

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan belum sepenuhnya dirasakan seluruh masyarakat.

Masih ada jalan di Kabupaten Sinjai belum pernah diaspal apalagi dihotmix.

Ialah jalan [Desa Terasa](#) dan [Desa Turungan Baji](#), Kecamatan [Sinjai Barat](#).

Warga menyebut Pemkab Sinjai belum pernah melakukan pengaspalan pada kedua jalan tersebut sejak Indonesia merdeka.

“Jalan tersebut tidak pernah tersentuh aspal, rabat beton atau hotmix,” Kata warga [Desa Terasa](#), Syamsul, Rabu (27/3/2024).

Kondisi ini menghambat akses menuju pasar dan akses lainnya.

Bahkan anak sekolah kesulitan melalui jalan tersebut, apalagi di musim hujan.

[Baca juga: Ingat Nuraeni? Bocah Viral di Sinjai Gendong Balita ke Sekolah, Adiknya Kini Masuk Kelompok Bermain](#)

Desa Terasa sendiri kata dia, ada delapan dusun dan beberapa diantaranya masih jalan tanah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

“Saat musim hujan warga setempat dan anak sekolah harus jalan kaki di jalan berlumpur setiap harinya saat menuju sekolah dan aktivitas warga lainnya,” ujarnya.

Sehingga, Syamsul mengaku, sebagai warga setempat hanya mampu mengadu nasib serta menggantungkan harapan kepada Penjabat Bupati, TR Fahsul Falah.

Ia berharap ada perhatian dan ada perbaikan di daerahnya.

"Kami hanya mampu mengadu nasib kepada penjabat Bupati Sekarang semoga ada perbaikan jalan di daerah kami," katanya.

Syamsul berharap, ke depan jalannya tidak menjadi korban politik lagi seperti terjadi 5 tahun lalu.

“Hanya persoalan peroleh suara tidak mencapai target sehingga jalan kami tak pernah dilirik oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati lalu,” ujarnya.

Sementara tepat bersebalahan dengan [Desa Terasa](#), yakni [Desa Turungan Baji](#), juga mengalami kondisi yang nyaris persis sama rusaknya.

Parahnya, jalan di [Desa Turungan Baji](#) merupakan akses terdekat menuju kota.

Hanya saja, belum mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Kalau jalanan kami, sejak 2018 dijanji oleh pemerintah untuk diperbaiki, namun hingga saat ini masih belum ada tindakan maksimal,” kata salah satu warga, Burhan.

“Bahkan jalan di Sappiareng, tepat di Dusun Soppeng semakin parah. Tak bisa lagi dilewati kendaraan roda empat,” lanjutnya.

Menurut Burhan, jika terus-menerus dibiarkan oleh pemerintah seperti itu.

Maka dirinya bersama warga lainnya akan kembali turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi.

“Kami akan bersatu dengan warga [Desa Terasa](#) untuk demo di Kabupaten, kalau memang pemerintah tidak mau serius mendengar aspirasi kami, toh kita sama-sama bayar pajak,” ujarnya.

Menurut Burhan Pemkab selama ini pilih kalau persoalan pembangunan infrastruktur.

“Tidak adil kalau pembangunan hanya di kota, sementara kita semakin terpinggirkan,” katanya. (*)

Adapun dalam hal tersebut, [Jembatan](#) penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

[Proyek](#) pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada [APBD](#) 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/03/27/2-jalan-di-sinjai-barat-tak-pernah-tersentuh-aspal-sejak-kemerdekaan-warga-pemerintah-pilih-kasih>
2. <https://sulse.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.